



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTARTO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN UMUM**
3. NHK : **847978**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.575.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m²/178 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m²/36 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 4.489 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 812 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 1.060 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
6. Tanah Seluas 1.625 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 165.000.000
7. Tanah Seluas 1.740 m² di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 750.000.000
8. Tanah Seluas 2.175 m² di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 263.500.000

1. MOBIL, KIA SEDAN RIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000



2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 0213, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	207.935.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	594.443.700
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.640.878.700
III. HUTANG	Rp.	141.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.499.878.700

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.